

Kemandirian dan Keadilan sebagai Paradigma Pembangunan

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita

Pengantar Diskusi Panel Majelis Kajian MIMBAR DEMOKRASI:

“Nilai Tambah Sektor-sektor Andalan dan Strategis dalam Mendulang Devisa dan Membuka Lapangan Kerja”

Bandung, 28 Mei 2005

Pendahuluan

1. Sektor-sektor andalan dan strategis, termasuk di dalamnya Industri Petrokimia, Agroindustri, serta Perikanan dan kelautan, sangat diharapkan kontribusinya dalam mendukung salah satu agenda pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah, yaitu *Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
2. Sasaran utama dari agenda tersebut adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2% pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1% pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga.
3. Untuk mencapai sasaran tersebut pertumbuhan ekonomi diupayakan meningkat dari 5,5% pada tahun 2005 menjadi 7,6% pada tahun 2009, sehingga dalam lima tahun mendatang dapat mencapai rata-rata 6,6% per tahun. Tingkat pertumbuhan ini, secara teoritik, diperlukan untuk menurunkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan.
4. Pengangguran akan dikurangi dari 9,5% pada tahun 2003 menjadi 6,7% pada tahun 2009. Sedangkan tingkat kemiskinan ditekan dari 16,6% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009. Sasaran laju pertumbuhan di atas hanya akan tercapai jika rasio investasi terhadap PDB dapat ditingkatkan dari 20,5% pada tahun 2004 menjadi 27,4% pada tahun 2009.
5. Satu hal penting dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi adalah bahwa pertumbuhan perekonomian selama ini lebih didorong oleh pertumbuhan konsumsi ketimbang investasi atau ekspor. Sehingga pertumbuhan tersebut tidak memberikan nilai tambah yang berarti.

6. Nilai tambah yang optimal dari sektor-sektor andalan hanya dapat dicapai manakala secara bersama bangsa ini mampu melepaskan diri dari ketergantungan luar negeri. Ketergantungan terbukti menjadi akar penyebab runtuhnya ekonomi kita, dengan krisis finansial sebagai mediumnya.
7. Di tengah menggebunya semangat globalisasi, memang terkesan kemandirian sebagai ide yang *absurd* dan *utopis*. Akan tetapi apabila perhatian kita alihkan kepada kenyataan bahwa di antara sektor riil yang bertahan di masa krisis adalah mereka yang senantiasa memiliki basis usahanya pada *local content* yang kuat, malah lebih dari itu pada banyak kasus pengusaha baru seperti itu bermunculan dan kemudian terbukti tangguh, maka seyogianya kita harus berpikir bahwa kemandirian adalah konsep yang realistis.

Pelajaran dari masa lalu

1. Sampai pada pertengahan dasawarsa 1990-an Indonesia menjadi salah satu contoh pembangunan yang berhasil.
2. Diperkirakan pada peralihan milenium, Indonesia menjadi negara industri baru, termasuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah, dengan tingkat kemiskinan di bawah 5%.
3. Keberhasilan ekonomi saat itu telah menutup mata kita terhadap masalah besar yang dihadapi, yaitu masalah kesenjangan dan ketergantungan kepada sumber daya luar negeri.
4. Ternyata ekonomi Indonesia memang runtuh dilanda badai krisis finansial yang dikenal sebagai krisis Asia. Memang bukan hanya Indonesia yang terserang, namun Indonesia yang paling parah terkena dampaknya. Sekaligus membuktikan bahwa perekonomian Indonesia adalah yang paling rapuh di antara negara yang terkena krisis.

Membangun kembali ekonomi

1. Dari pengalaman itu, dapat ditarik kesimpulan upaya membangun ekonomi Indonesia harus menghindari terjadinya kekeliruan yang sama.
2. Pertumbuhan yang tinggi saja tidak membuat ekonomi menjadi kokoh.

3. Ada dua unsur lain yang harus bisa menjadi pedoman dalam membangun kembali perekonomian kita, yaitu kemandirian dan keadilan.

Membangun kemandirian

1. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian.
2. Di tahun 1960an, cita-cita kemandirian itu diterjemahkan dalam politik berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, yang lebih mencerminkan sikap defensif menghadapi dunia luar daripada suatu konsep yang proaktif.
3. Perkembangan dunia yang cepat menuju ke arah kehidupan global telah membangkitkan perhatian lebih besar kepada masalah kemandirian yaitu akan perlunya ketegasan bahwa kemajuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat haruslah bersamaan dengan peningkatan kemandirian.
4. Kedua tujuan itu satu sama lain saling berkaitan dan tidak saling mengecualikan (*not mutually exclusive*). Bangsa yang ingin dibangun bukan hanya yang maju, tetapi juga mandiri. Konsep kemandirian ini bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Dengan demikian, masalah kemandirian tidak didasarkan pada paradigma ketergantungan yang banyak dibicarakan terutama di negara-negara berkembang di Amerika Latin pada tahun '50 dan '60-an.
5. Kemandirian dengan demikian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan (*interdependency*) yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu negara, maupun masyarakat bangsa-bangsa. Justru persoalan kemandirian itu timbul oleh karena adanya kondisi saling ketergantungan.
6. Kemandirian dengan demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.
7. Suatu bangsa dikatakan semakin mandiri apabila bangsa tersebut semakin mampu mewujudkan kehidupannya yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan

kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi.

8. Untuk dapat mandiri, suatu bangsa harus maju. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, makin tinggi tingkat kesehatannya dan makin tinggi tingkat pendapatan penduduk, serta makin merata pendistribusiannya. Sering kali ada penekanan pada peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak laju pertumbuhan, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja; berkembangnya keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan jangka panjang.
9. Namun, meskipun kemajuan dan kemandirian mencerminkan perkembangan ekonomi suatu bangsa, ia tidak semata-mata konsep ekonomi. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.
10. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau suatu bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya.
11. Karena itu, ukuran kemajuan dan kemandirian suatu bangsa tidak dapat hanya berupa pendapatan per kapita, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut manusianya. Manusia adalah sumber daya pembangunan yang paling utama di antara sumber-sumber daya lain yang akan dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Mengenai keadilan

1. Hal itu berarti pula bahwa pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Demokrasi berarti partisipasi yang aktif dan adil bagi rakyat baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Oleh karena itulah, masalah keadilan merupakan paradigma pembangunan yang sama penting dan sederajat dengan paradigma lain.

2. Konsep pembangunan ekonomi yang memberikan penekanan hanya kepada pertumbuhan dan menggunakan pertumbuhan sebagai ukuran utama keberhasilan terbukti telah gagal. Artinya kemajuan yang diukur melalui membesarnya produksi nasional tidak otomatis menjamin bahwa pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata. Masalah utamanya, adalah ketidakseimbangan dalam kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan. Dengan proses pembangunan yang terus berlanjut, ketidakseimbangan itu cenderung makin membesar yang mengakibatkan makin melebarnya jurang kesenjangan.
3. Kesenjangan itu merupakan akibat dari tidak merata dan setaranya pemilikan dan akses kepada sumber daya produksi, produktivitas serta sistem distribusi dan pasarnya, di antara para pelaku ekonomi. Kelompok masyarakat dengan pemilikan dan akses ke faktor produksi terbatas dan produktivitas rendah yang menghasilkan tingkat kesejahteraan rendah dihadapkan pada kelompok pelaku ekonomi maju dan kuat.
4. Kesenjangan struktural ini tercermin baik dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun permodalan. Dengan struktur yang seperti itu, perekonomian nasional menjadi kurang kukuh dan sangat rentan.
5. Apabila ekonomi Indonesia akan tumbuh secara berkesinambungan (*sustainable*), bahkan sesungguhnya untuk *survive* saja dalam persaingan global, maka sistem dan tatanan sosial ekonomi bangsa Indonesia harus diperbaiki.

[Mahbub ul Haq di tahun 1971, menulis "*we were taught to take care of our GNP as this will take care of poverty. Let us reverse this and take care of poverty as this will take care of the GNP*".]

Format ekonomi baru

1. Memang ekonomi membutuhkan investasi untuk tumbuh, dan kalau kemampuan tabungan dalam negeri belum memadai harus dibuka kemungkinan dan daya tarik untuk masuknya modal dari luar negeri. Namun, harus dihindari suasana ketergantungan kepada sumber daya eksternal yang telah membius kita sekian lama, sehingga kita mengabaikan kemampuan dan potensi yang sesungguhnya dapat dikembangkan di dalam negeri.

2. Tidak bisa lagi ekonomi nasional disandarkan perkembangannya kepada segelintir kelompok pemodal, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Harus diciptakan basis ekonomi yang lebih luas sehingga menjadi lebih kokoh.
3. Saat ini tepat sekali untuk mengembalikan cita-cita keadilan dan semangat kemandirian bangsa yang merupakan kelanjutan semangat kemerdekaan. Hendaknya kita tidak membiarkan pemulihan ekonomi kita menghasilkan kondisi ekonomi yang sama seperti sebelum krisis ekonomi.
4. Format ekonomi baru seyogianya mengasumsikan:
 - 1) Sumber kekuatan ekonomi kita harus berasal dalam diri, tubuh, alam dan budaya bangsa kita sendiri, sedang yang lainnya bersifat melengkapi saja.
 - 2) Menjamin bahwa manfaat ekonomi sampai kepada rakyat secara luas.
 - 3) Mencegah membesarnya kesenjangan.